

## DAFTAR ISI

### Daftar Isi

#### Pedoman Transliterasi

#### Dari Penyunting

Umat Islam, Kristen, dan Yahudi: Studi tentang Kontribusi Intelektual Masyarakat Kristen dan Yahudi Terhadap Peradaban Islam pada Masa Dinasti 'Abbāsiyah

*A Choirul Rofiq* → 150 - 178

Arah Globalisasi Ummat Islam dalam Dinamika Sejarah Islam Indonesia: Sebuah Terobosan *Cultural Histories*

*Muhammad Irfan Riyadi* → 179 - 188

*Imkān al-Ru'yat* Sebagai Alternatif Pemersatu Kalender Islam: Memadukan *Ru'yat* NU dan *Hisāb* Muhammadiyah dalam Menentukan Kalender Islam

*Ahmad Junaidi* → 189 - 204

Paradigma Nalar Gender: Memotret Kepemimpinan Perempuan dengan Kacamata Pendidikan Inklusif Berperspektif Gender

*Aksin* → 205 - 216

Perlawanan Kaum Tertindas (*Mustadh'afin*) Menurut Al-Qur'an

*Iswahyudi* → 217 - 248

Larangan Korupsi: Telaah terhadap Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW tentang Suap

*Umar Sidiq* → 249 - 259

Sholat dan Meditasi dalam Analisis Hermeneutika Fenomenologis: Sebuah Refleksi Komparatif

*M. Endy Saputro* → 261 - 270

Kontroversi Rokok: Telaah Hermeneutis atas Kitab *Irsyādu al-Ikhwān* Karya Syekh Ihsan Jampes

*Muhammad Nurdin* → 271 - 300

Mengefektifkan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) pada Madrasah Tsanawiyah

*Safrudin Aziz* → 301 - 317

#### Book Review

Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme dalam Wacana Global

*M. L. T.* → 319 - 325

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf

ا	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	<u>h</u>	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	'
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

### 2. Madd dan Diftong

ا	=	â	او	=	aw
اي	=	î	أو	=	uw
أو	=	û	أي	=	ay
			إي	=	iy

## PARADIGMA NALAR GENDER

### Memotret Kepemimpinan Perempuan dengan Kacamata Pendidikan Inklusif Berperspektif Gender

Aksin

Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Ponorogo

**Abstract:** When the women are to be given their equal social status by gender activists, women now began to take their roles. They are able to exist and assume their new roles as humanbeings equal with men, especially their roles as the leaders in education institutions, both Islamic educational institutions and public ones. If not, what the barriers are. Being able, are they given the same opportunities as men? Then, what we actually do for women, not only to give them their roles as perfect humanbeings, but also give them the same opportunities as men.

**Keywords:** paradigma, gender, dan inklusif.

## PENDAHULUAN

Program akbar kongres kepemimpinan perempuan dalam dunia pendidikan yang diadakan LAPIS PGMI beberapa waktu yang lalu benar-benar menjadi ajang *curhat* dan pencerahan uneg-uneg yang selama ini menimpa kaum perempuan. Diskusi hangat terjadi di berbagai forum, baik dalam forum besar yang menghadirkan tokoh dan pemikir nasional, maupun forum kecil yang dipenuhi pemikir-pemikir lokal dari berbagai daerah Nusantara. Kendati banyak masalah yang dihadapi kaum perempuan, baik masalah domestik maupun publik, tetapi yang menjadi tema sentral dalam kongres ini adalah "Kepemimpinan Perempuan Dalam Dunia Pendidikan". Asumsi sementara, ada persoalan dalam kepemimpinan perempuan.

Di antara sekian persoalan yang menimpa kepemimpinan perempuan dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia khususnya adalah "minimnya jumlah" kaum perempuan yang menjadi pemimpin. Sangat sedikit perempuan menjadi pemimpin dalam lembaga pendidikan Islam, baik lembaga formal semacam STAIN, IAIN, dan UIN, maupun dalam lembaga dan organisasi sosial keagamaan yang membawahi masyarakat secara keseluruhan. Selain aspek jumlah, yang

“kualitas” kepemimpinannya ketika mereka menduduki posisi strategis itu. Jarang ditemukan pemimpin perempuan yang mampu melakukan terobosan baru yang dapat membawa lembaga dan organisasinya melakukan lompatan jauh kedepan melampaui terobosan kepemimpinan yang dilakukan laki-laki. Meskipun ada, itu bisa dihitung dengan jari.

Masalahnya adalah, apakah “minimnya jumlah” dan “lemahnya kualitas kepemimpinan perempuan”, khususnya dalam dunia pendidikan Islam disebabkan oleh kondisi perempuan sendiri yang secara kodrati memang tidak memungkinkan memangku jabatan itu, atau ada faktor luar yang melingkupinya, semisal budaya, politik dan agama?

Untuk menjawab persoalan yang dilematis itu, tentu diperlukan pengkajian terhadap akar persoalan yang menimpa kaum perempuan, khususnya terhadap kondisi budaya, institusi negara, dan agama. Akar persoalan yang ditemukan dari ketiga kondisi itu menentukan “tujuan”, “strategi” dan “solusi pemecahannya, baik dalam bentuk rekomendasi maupun aksi”. Inilah yang menjadi obyek kajian refleksi ini.

## **MENYELAMI PERSOALAN YANG DIHADAPI KAUM PEREMPUAN**

Masalah kualitas dan kuantitas kepemimpinan kaum perempuan dalam dunia pendidikan Islam khususnya sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor, namun itu bisa disederhanakan menjadi dua kategori saja, eksternal dan internal. Yang dimaksud eksternal dalam hal ini adalah budaya, politik dan agama, sedang internal adalah kondisi perempuan itu sendiri. Yang pertama menjadi penyebab lahirnya yang kedua. Itu tidak lain karena selama ini muncul “asumsi” di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahwa perempuan secara kodrati berada di bawah kaum laki-laki. Tidak hanya secara kodrati, tapi juga secara teologis.

Budaya dinilai sebagai faktor yang melahirkan masalah bagi perempuan, karena budaya masyarakat Indonesia bersifat patriarkhi, di mana kaum laki-laki diberi posisi superior di atas posisi perempuan. Budaya patriarkhi ini lama-kelamaan menjadi sesuatu yang pasti pada dirinya, seolah sunnatullah yang tidak bakal mengalami perubahan. Tuhan sudah mengkodratkan demikian. Budaya patriarkhi kiranya tidak dinilai sebagai masalah, andaikata tidak melahirkan diskriminasi

gender.<sup>1</sup> Namun ternyata, perempuan tidak hanya mengalami diskriminasi dari budaya itu, tetapi juga marginalisasi, stereotype, subordinasi, dan bahkan mengalami tindak kekerasan.<sup>2</sup>

Budaya patriarkhi ini kemudian berpengaruh terhadap pemegang kebijakan politis, utamanya dalam dunia pendidikan. Jika pemegang otoritas politik lahir dan hidup dalam budaya patriarkhi, tentu saja gaya berfikir, kesadaran dan alam bawah sadarnya dipengaruhi budaya patriarkhi itu. Sebab, manusia adalah anak zamannya.<sup>3</sup> Akibatnya, para pemegang kebijakan, baik pemegang kebijakan formal pemerintahan maupun pemegang kebijakan lembaga pendidikan keagamaan dan organisasi sosial keagamaan, kurang memiliki sensitifitas gender. Arah kebijakannya pun juga tidak memiliki sensitifitas gender. Kendati kebijakan politis pemerintah pasca rezim Orde Baru acapkali memberikan porsi 30 persen bagi perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan dunia publik, tetapi tetap saja, itu tidak mencerminkan kebijakan yang sensitif gender. Sebab, kebijakan itu hanya sekedar memenuhi desakan dari luar, terutama yang dilakukan para pendekar feminis.

Budaya patriarkhi dan kebijakan politik yang tidak sensitif gender pada gilirannya berpengaruh terhadap “pemahaman keagamaan”. Agama acapkali dipahami dalam perspektif budaya “patriarkhi” dan tidak “sensitif” gender. Ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan ditafsiri dengan *optic* laki-laki. Argumen yang mereka kemukakan bersifat teologis. Tidak ada nabi perempuan, tidak ada pemimpin kekhalifahan yang berjenis kelamin perempuan, dan tidak ada imam perempuan. Yang ada hanya nabi laki-laki, pemimpin laki-laki dan imam laki-laki. Begitulah sebagian besar masyarakat Islam Indonesia berfikir.

---

<sup>1</sup> Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 12.

<sup>2</sup> *Ibid*, 71-76.

<sup>3</sup> Dalam konsepsi sosiologi pengetahuan dikatakan bahwa manusia hidup tidak dalam ruang hampa. Ia hidup dalam ruang dan waktu yang penuh dengan makna dan realitas, baik realitas ekonomi, sosial politik, budaya atau agama. Ruang dan waktu itu berdiri secara mandiri lepas dari pantauan dan kendali manusia, sebaliknya manusia dikendalikan oleh ruang dan waktu tersebut. Karena itu, pemikiran seorang tidak bisa lepas dari realitas dimana dia hidup dan memproduksi pemikirannya. Karl Mannheim, *Ideologi Dan Utopia: Menyingkp Kaitn Pikiran Dan Politik* (Yogyakarta: KANISIUS, 1993), 317. Lihat juga Karl Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,



Pola penafsiran agama yang demikian tidak hanya menempatkan kaum perempuan pada posisi kedua, baik dalam ruang domestik maupun ruang publik, tetapi lebih dari itu, menjadikan agama sebagai “justifikasi” bagi marginalisasi, stereotape, diskriminasi, subordinasi dan bahkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Seolah sudah menjadi sesuatu yang bersifat teologis, perempuan hidup dalam posisi lemah, tertindas dan termarginalkan. Perempuan menyeleweng dari ikatan rumah tangga suci, maka suami boleh menempelengnya atas nama agama. Tetapi tidak sebaliknya.

Terpinggirkannya kaum perempuan ke posisi kedua di bawah laki-laki membuat perempuan menjadi “sesuatu yang diasumsikan”. Karena, bukan hanya termarginalisasi, tetapi segala kesempatan yang diberikan pada perempuan oleh budaya, politik dan agama sangat kecil. Manusia perempuan pun tidak mempunyai kesempatan leluasa mendidik dirinya menjadi manusia berkualitas menyamai laki-laki. Ketika berkemampuan pun, perempuan tetap dipandang sebelah mata. Ketika mereka sudah menjadi “sesuatu yang diasumsikan”, maka kesempatan luas yang diberikan akhirnya menjadi tidak berarti, dan tidak mereka manfaatkan secara maksimal. Kalau ini yang terjadi, maka masalah yang dihadapi perempuan juga lahir dari perempuan itu sendiri.

Dengan analisis singkat ini kini bisa dikatakan bahwa masalah yang dihadapi kaum perempuan berawal dari budaya masyarakat yang patriarkhi. Patriarkhi budaya merembet juga pada patriarkhi politik, dan patriarkhi keduanya tentu saja merembet pada patriarkhi agama. Sebut saja yang terakhir ini sebagai agama patriarkhi, yakni agama yang dilihat dalam optik laki-laki. Ketiga unsur itu pada gilirannya menciptakan perempuan “sebagaimana diasumsikan oleh ketiganya”. Singkat kata, masalah minimnya jumlah dan lemahnya kualitas kepemimpinan perempuan disebabkan oleh dua hal: *pertama* dan utama adalah faktor budaya, politik dan agama; *kedua*, perempuan itu sendiri.<sup>4</sup>

## MENGUBAH PARADIGMA: BUDAYA, POLITIK DAN AGAMA

Atas dasar kenyataan di atas, maka untuk mengatasi masalah kepemimpinan yang dihadapi kaum perempuan sebagaimana agenda di

<sup>4</sup> Dalam analisis ini, penulis tidak saja melihat dari sudut teori analisis gender liberal sebagaimana umum digunakan dalam gerakan feminis Indonesia, tapi juga analisis marxisme sosialis. Mengenai teori-teori analisis gender, lihat M. F. ...

atas, diperlukan “perubahan” pada ketiga ranah itu, di samping pada kondisi perempuan itu sendiri. Diperlukan perubahan arah budaya, dari budaya patriarki ke budaya egaliter, sehingga melahirkan pemimpin formal yang berfikir “egaliter” dan “sensitif gender”. Karena perubahan budaya akan mempengaruhi perubahan pada ranah politik, terutama pada level pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan. Ketika budaya telah berubah, para pengambil kebijakan tidak lagi menghadapi tantangan dari budaya. Perubahan kedua ranah ini tentu saja berakibat pada perubahan pemahaman dan tafsir agama.<sup>5</sup> Agama tidak hanya dilihat dalam kacamata laki-laki, dan juga tidak lagi dijadikan justifikasi bagi diskriminasi gender, melainkan sebagai pembebas.

Perubahan-perubahan itu bisa dilakukan melalui banyak hal, termasuk dan terutama melalui pendidikan.<sup>6</sup> Karena terjadi dialektika antara budaya dengan pendidikan. Kendati tidak seketika, paling tidak untuk masa-masa mendatang pendidikan itu membantu melakukan perubahan budaya itu. Itu tidak lain, karena pendidikan merupakan transformasi budaya masa lalu kepada manusia muda calon penghuni dan pemimpin masa depan.<sup>7</sup> Andaikata kebijakan pemerintah mengenai pendidikan mempertimbangkan kondisi perempuan sebagai manusia yang sama dengan laki-laki, baik dalam hal pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, maupun perumusan kurikulum pendidikan, secara perlahan tapi pasti, dengan sendirinya permasalahan kepemimpinan perempuan itu akan dapat diatasi di masa mendatang.

Perubahan kebijakan itu misalnya dengan cara menciptakan manajemen dan keorganisasian yang inklusif dan berperspektif gender. Suatu kebijakan harus berada dalam bingkai keragaman dan perbedaan, baik yang bersifat konstruksi atau kodrati, dan berpihak pada kesetaraan dan non-diskriminasi. Kebijakan seperti ini diimbangi pula dengan pembuatan program kerja yang juga dilandasi semangat

---

<sup>5</sup> Itu tidak lain, karena budaya dan agama sebenarnya serasi. Tentang keserasian budaya dan agama, lihat, Damardjati Supajar, “Keserasian Agama dan Budaya yang Tercermin pada Beberapa Kepustakaan Jawa” dalam M. Mashur Amin (editor), *Moralitas Pembangunan, Perspektif Agama-Agama di Indonesia* (Yogyakarta: LKPSM, 1994), 111-139; Muhammad Chirzin, “Keserasian Agama dan Budaya dalam Pembangunan”, dalam M. Mashur Amin (editor), *Moralitas Pembangunan, Perspektif Agama-Agama Di Indonesia*, 140-165.

<sup>6</sup> Karena memang aspek pendidikan inilah yang menjadi tema sentral program LAPIS-PGMI.

<sup>7</sup> Faisal Yusuf, *Manajemen Dana Pendidikan Islam: di Tengah Kompleksitas Tantangan*

inklusifitas dan berwawasan gender, dan penyusunan kurikulum dan metode pendidikan yang memperhatikan inklusifitas dan berwawasan gender. Itu artinya, upaya-upaya penanganan masalah kepemimpinan yang dihadapi kaum perempuan harus dikembangkan secara “struktural” dan “sistemik” seiring dengan perkembangan kelembagaan dan organisasi pendidikan.<sup>8</sup> Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem pendidikan yang inklusif dan berperspektif gender.

Bagaimana model pendidikan yang inklusif dan berperspektif gender itu?

#### a. Pendidikan Inklusif Berperspektif Gender: Menciptakan Anak Didik yang Menghargai Kemagaman dan Perbedaan

Pendidikan pada dasarnya adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, sistimatis, berkesinambungan, terpola, dan terstruktur terhadap anak-anak didik dalam rangka untuk membentuk para peserta didik tadi menjadi sosok manusia yang berkualitas secara nalar-intelektual dan berkualitas secara moral-spiritual,<sup>9</sup> sehingga mereka nantinya bisa menjadi manusia yang cakap, pandai, trampil, dan mampu hidup secara mandiri dan hidup secara layak dalam memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.<sup>10</sup> Secara praktis yang bersifat formal-akademis kelembagaan, kegiatan pendidikan merupakan suatu sistem yang terpadu. Sebagai suatu sistem, pendidikan mensyaratkan adanya berbagai perangkat yang saling terkait, seperti para pendidik, anak didik, sarana dan prasarana, kurikulum dan materi pendidikan, metode pendidikan dan tujuan pendidikan.<sup>11</sup>

Namun tidak selamanya pendidikan itu mampu memecahkan persoalan ketidakadilan gender, bahkan mungkin saja justru menjadi biang keladi lahirnya ketidakadilan gender. Pendidikan yang dimaksud adalah sistem pendidikan yang eksklusif dan tidak berperspektif gender. Dikatakan demikian, karena pendidikan seperti itu acapkali berkeinginan menciptakan keseragaman, dan menolak keragaman dan perbedaan, termasuk dalam hal menyikapi perbedaan anak-anak yang membutuhkan khusus, berjenis berbeda kelamin. Yang juga penting dicatat, sistem pendidikan seperti itu tidak sensitif gender. Kondisi ini berjalan selama bertahun-tahun di negara kita tercinta ini, sehingga

<sup>8</sup> Mansur Faqih, *Analisis Gender*, 163-164.

<sup>9</sup> Faisal Ismail, *Masa Depan Pendidikan Islam*, 1.

<sup>10</sup> Ibid., 2.



budaya kita semakin kokoh menjadi budaya patriarkhi. Diskriminasi genderpun semakin kokoh di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan pendidikan yang mampu merubah budaya patriarkhi itu, dan pendidikan dimaksud adalah pendidikan inklusif yang berperspektif gender.

Yang dimaksud pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengakui dan mempertimbangkan keragaman dan perbedaan kebutuhan peserta didik, minat, pengalaman, dan cara belajar, baik yang disebabkan oleh kontruksi sosial atau yang bersifat kodrat. Sebab, pada dasarnya manusia dicipta dalam keadaan “beragam” namun dalam posisi “setara”. Pendidikan inklusif dikatakan berperspektif gender jika sistem pendidikan itu menempatkan, menyikapi dan memperlakukan semua peserta didik secara setara tanpa membedakan jenis kelamin.

Pendidikan inklusif dan berperspektif gender ini dinilai mampu mengatasi persoalan yang dihadapi kaum perempuan, karena pendidikan seperti ini bertujuan menciptakan manusia atau anak didik yang menghargai keragaman, perbedaan dan kesetaraan dalam keragaman, baik dalam berfikir maupun bersikap. Tidak hanya sebatas itu, mereka juga akan berfikir dan bersikap toleran terhadap anak didik yang berkebutuhan khusus, baik yang bersifat kodrati, seperti anak-anak cacat, maupun yang bersifat konstruksi, seperti anak-anak korban narkoba dan HIV/ID.

Untuk membangun pendidikan inklusif dan bersensitif gender, diperlukan “ruang yang kondusif” bagi tercapainya kedua tujuan itu. Ruang dimaksud adalah sekolah dan undang-undangnya. Sekolah diharapkan mempunyai undang-undang yang inklusif dan berperspektif gender, dan tentu saja menerapkan undang-undang sekolah tersebut. Seluruh penghuni sekolah, baik pemimpin, guru, tenaga adminitrasi dan anak didik harus menaati undang-undang itu. Agar tujuan itu terlaksana, maka sekolah harus berperan aktif memberikan pelatihan, seminar, advokasi, dan atau workshop mengenai pendidikan inklusif dan wawasan tentang gender terhadap seluruh penghuni sekolah.<sup>12</sup> Dalam arti, unsur-unsur utama pendidikan, seperti pendidik, anak didik, sarana dan prasarana, dan metode pendidikan, harus mencerminkan inklusifitas dan berwawasan gender.

---

<sup>12</sup> M. Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk*

Bahwa para guru atau pendidik sebagai transformator ilmu harus berfikir inklusif dan berwawasan gender, karena mereka adalah figur utama bagi anak didik, khususnya dalam lingkungan sekolah. Guru yang berfikir inklusif dan berwawasan gender akan berfikir dan bersikap toleran terhadap keragaman dan perbedaan, anti diskriminasi gender, dan tentu saja sensitif terhadap permasalahan gender, terutama terhadap anak-anak didiknya yang berbeda jenis kelamin.

Agar wawasan guru yang inklusif dan sadar gender dapat ditransformasikan kepada anak didik, maka diperlukan pula “materi pelajaran” atau kurikulum yang inklusif dan berwawasan gender. Beberapa kurikulum yang bernada “diskriminasi gender” yang selama ini diajarkan di sekolah-sekolah harus diganti dengan kurikulum yang berbasis “kesetaraan gender”. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia yang selalu mengisahkan pekerjaan bapak dan ibu. Buku pelajaran bahasa Indonesia mengisahkan, “bapak bekerja di kantor, ibu bekerja di rumah”. Kisah seperti ini mendiskreditkan kaum perempuan yang hanya disimbolkan berada di rumah.

Tidak hanya itu. Sarana dan prasarananya pun harus pula mencerminkan penghargaan terhadap keragaman dan perbedaan gender. Misalnya, pelbagai alat peraga, seperti gambar, permainan, dan sebagainya harus memenuhi seluruh kebutuhan anak didik tanpa melihat perbedaan yang berkebutuhan khusus, baik yang bersifat kodrati maupun konstruksi, seperti anak cacat dan jenis kelamin. Begitu juga metode pengajarannya.

#### **b. Perempuan: Menjadi Pemimpin atau Manusia Yang Menghargai Keragaman dan Perbedaan**

Sistem pendidikan dan tujuan pendidikan yang inklusif dan berperspektif gender sebagaimana digambarkan di atas tidak hanya sekedar menciptakan anak didik yang mampu menjadi pemimpin, baik dalam dunia politik maupun dunia pendidikan, tetapi dan ini yang paling penting adalah menciptakan anak didik yang berfikir dan bersikap toleran terhadap keragaman, perbedaan dan bersensitif gender. Anak didik yang berfikir dan bersikap toleran serta bersensitif gender lebih utama daripada hanya sekedar menjadi pemimpin dan mempunyai kemampuan memimpin. Sebab, untuk menjadi pemimpin, bisa melalui proses politik, seperti terlihat dalam perpolitikan Indonesia; melalui budaya, seperti partai yang berbasis primordial; dan bisa juga melalui paham keagamaan, seperti *imamah* dalam tradisi

syi'ah. Baik dalam kepemimpinan kharismatik-tradisional<sup>13</sup> maupun kepemimpinan kualitatif-modern.

Namun penting dicatat, menjadi pemimpin tidak menjamin seseorang mampu menciptakan sistem sosial yang manusiawi, yang menghargai keragaman dan perbedaan, apalagi yang bersensitif gender. Karena manusia yang berfikir otoriter dan tidak sensitif gender pun bisa menjadi pemimpin.

Lebih dari sekedar itu, sistem pendidikan inklusif dan berwawasan gender sebagaimana diusung LAPIS-PGMI akan menciptakan anak didik yang berfikir dan bersikap toleran, menghargai keragaman dan perbedaan, dan terutama mempunyai sensitifitas gender. Mereka tidak sekedar mengejar ambisi untuk menjadi pemimpin formal kelembagaan dan organisasi social keagamaan, tetapi bagaimana menjadikan manusia damai bersamanya. Dengan tangan dan lisannya, dia akan menciptakan kedamaian buat manusia lainnya. Pendidikan seperti itu tidak hanya menciptakan manusia yang siap menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi manusia yang siap dipimpin. Dia bisa menciptakan kedamaian kendati tidak menjadi pemimpin formal.

### c. Menjadi Penebar Kedamaian Bersama Islam

Pemimpin yang berfikir inklusif dan berwawasan gender acapkali menjadikan agama sebagai pendorong terciptanya kedamaian bersama. Namun karena Islam sebagai agama selama ini acapkali dijadikan justifikasi tindakan kekerasan, maka pengertian Islam dalam "al-Qur'an"<sup>14</sup> perlu dimaknai ulang. Pemaknaan ulang ini dimaksudkan agar kekerasan, baik kekerasan terhadap penganut agama lain maupun terhadap perempuan yang dilakukan sebagian kecil umat Islam yang mengklaim memiliki pemahaman yang benar atas Islam, tidak justru membawa kemadlaratan yang lebih besar bagi umat Islam pada umumnya.

Selama ini, umat dibingungkan oleh pemaknaan yang umum digunakan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan "kepatuhan

---

<sup>13</sup> Reinhard Bendix, "Refleksi Tentang Kepemimpinan Kharismatis", dalam Denis Wrong (editor), *Maxs Weber: Sebuah Hazanah*, terj. Asnawi, (Yogyakarta: Ikon, 2003), 261-264.

<sup>14</sup> Kata al-Qur'an sengaja diberi tanda petik, lantaran penulis mempunyai pemahaman tersendiri tentang konsep wahyu Tuhan ini. Penggunaan istilah al-Qur'an dipertahankan dalam tulisan ini karena kata ini telah umum digunakan dan penulis tidak berpretensi mengkaji kata ini, melainkan konsep al-Qur'an tentang kata Islam. Tentang ~~dan~~ penulis terhadap konsep wahyu. lihat karya penulis: *Menguat Otentisitas Wahyu*



total” kepada Tuhan, dalam artian negatif, tetapi dalam konteks komunikasi kemanusiaan kata itu justru dipahami sebagai “paksaan” kepada manusia lain untuk mematuhi dan menjalankan perintah Tuhan secara sukarela atau terpaksa. Dengan kata lain, bagi penganutnya kata itu digunakan arti negatif, sebagai sikap tunduk secara total, sebaliknya diartikan secara positif, sebagai tindakan pemaksaan bagi kelompok lain di luar penganutnya.

Dalam al-Qur’an,<sup>15</sup> bentuk kata yang berkaitan dengan “Islam” berbeda-beda, baik dari segi kata maupun makna. Kata “Islam” dalam al-Qur’an berakar kata “s-l-m” dan dari akar kata ini dapat diturunkan pelbagai bentuk kata. Akar kata ini berarti “merasa aman, utuh dan integral”.<sup>16</sup> Prinsip-prinsip itu semua, meminjam konsepsi Imam Syatibi,<sup>17</sup> mengacu pada apa yang dia sebut dengan ‘*ushul khamsah*’. Ia meliputi, agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.<sup>18</sup> Lima konsep dasar kemanusiaan ini, tidak terpengaruh oleh identitas eksternal yang dimiliki seseorang, baik dari segi agama, etnis, gender maupun status sosial masyarakat yang lain. Lima konsep dasar ini, sejalan dengan konsep kesatuan kemanusiaan yang ditawarkan al-Qur’an, “wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertaqwa”.<sup>19</sup>

Dalam konsepsi Syatibi, lima unsur dasar kemanusiaan ini, dipelihara dari tindakan semena-mena, melalui pemeliharaan dari segi positif dan dari segi negatif. Dari segi positif, disertai dengan aturan-aturan yang harus dilakukan demi tegaknya kemanusiaan manusia, seperti, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, membantu orang miskin, menegakkan keadilan dan sebagainya, sedang dari sisi negatif, adalah memberikan hukuman bagi para pelanggarnya, misalnya, pencuri dihukum potong tangan, pezina dihukum rajam dan begitu seterusnya. Dua langkah ini sebagai langkah konkrit dari tiga status hak asasi yang berkaitan dengan eksistensi kemanusiaan, *daruri*, *hajiyy* dan

<sup>15</sup> Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), 127. Menurut Mahmud Ayoub, kata awal *salamu* berarti menyetujui sesuatu. Mahmud Ayoub, *Islam: Faith and Practice*, (Canada: Markham Ontario L3R 2W2, 1989), 21.

<sup>16</sup> Fazlur Rahman, *Neomodernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 1987), 95.

<sup>17</sup> Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid II, pentahkik, Ibrahim Romadlon, (Libanon, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), 33.

<sup>18</sup> Imam Qarafi menambahkan satu unsur lagi, yakni kehormatan. Yusuf Qordlawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 173.



*tahsiniy*. Yang pertama menjadi pusat eksistensi, di mana jika unsur pertama ini rusak, maka rusaklah semua status yang berada di bawahnya. Karena itu, yang *dlaruri*, sejatinya diutamakan dari pada yang lainnya. Unsur kedua dan ketiga berada dalam posisi sekunder, karena pada hakikatnya, dua yang tekahir ini, sebagai tekhnis oprasional dari unsur yang pertama. Seperti, demi terlaksananya pelaksanaan keadilan sosial ekonomi, sebagai unsur hak asasi yang *dāruri*, maka Muhammadiyah memberlakukan zakat bagi masyarakat Arab, sebagai unsur *hājiy*, dan agar pelaksanaan zakat itu mudah ditunaikan masyarakat, maka zakat dikemas dengan bahasa halus yang dapat menyentuh rasa kalbu masyarakat yaitu dalam kemasan agama, bahwa salah satu unsur agama adalah membayar zakat, ini sebagai unsur tahsiniy, karena agama acapkali dapat merubah hati nurani manusia, baik dalam mengerjakan maupun dalam meninggalkan sesuatu.

Dengan lima prinsip universal agama ini, kini bisa ditegaskan bahwa sejatinya Islam itu mengajarkan kedamaian, termasuk terhadap perempuan. Atas dasar itu pula, pendidikan bagi perempuan sejatinya adalah pendidikan yang mendorong mereka menjadi pioner dalam menciptakan kedamaian di bumi Nusantara nan indah ini.

## PENUTUP

Dari paparan teoritis di atas kini penulis menawarkan dua hal: rekomendasi dan aksi. Direkomendasikan pada pemegang kebijakan, baik formal pemerintah maupun lembaga pendidikan keagamaan untuk mendirikan sekolah yang inklusif dan berperspektif gender. Salah satu caranya adalah mendesak agenda pembuatan program kerja, pengalokasian anggaran dan penyusunan kurikulum yang mempertimbangkan keragaman, baik keragaman yang berkaitan dengan konstruksi sosial maupun keragaman yang bersifat kodrati.

Sedang aksinya adalah menyusun undang-undang yang mendukung terciptanya ruang yang kondusif bagi pendidikan inklusif dan berwawasan gender, dan ajaran Islam kedamaian, melakukan advokasi, mengadakan workshop, seminar, menyusun buku, dan termasuk kongres.

